

APAKAH ADA PERBAIKAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN LANGKAT JIKA DIPOTRET DARI RASIO LAPORAN KEUANGAN SETIAP TAHUN?

Sahala Purba^{1*}, Intan Elestrida Br Siregar², Anggi Regia Br Munthe³, Alya Arshinta Br Sebayang⁴,
Renata Febiola Sihombing⁵, Dina Natalia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Methodist Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi: sahala824@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2015–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan sepuluh indikator, yaitu: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, (5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, (6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah, (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah, (8) Rasio Derajat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah, (9) Rasio Belanja Operasional, dan (10) Rasio Pertumbuhan PAD. Metode Penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah mulai tahun 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 8% dengan pola hubungan instruktif, sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 85% menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi. Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 24%, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 102%, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebesar 10%, Rasio Efektivitas Pajak Daerah sebesar 105%, Rasio Efisiensi Pajak Daerah sebesar 4%, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah sebesar 4%, Rasio Belanja Operasional sebesar 50%, dan Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 18%.

Kata kunci : analisis rasio keuangan, kinerja keuangan, pemerintah kabupaten langkat

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Langkat Regency Government based on financial reports from 2015 to 2024. A descriptive quantitative method utilizing financial ratio analysis was employed. The study utilized ten indicators: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) Regional Financial Dependency Ratio, (3) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (4) Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, (5) Local Own-Source Revenue (PAD) Efficiency Ratio, (6) Local Tax Effectiveness Ratio, (7) Local Tax Efficiency Ratio, (8) Regional-Owned Enterprise Contribution Ratio, (9) Operational Expenditure Ratio, and (10) PAD Growth Ratio. The research methodology involved a descriptive quantitative approach analyzing local government financial reports from 2015 to 2024. The results indicate that Langkat Regency's financial performance remains heavily reliant on central government transfers. The average Regional Financial Independence Ratio was 8%, reflecting an "instructive" relationship pattern, while the Regional Financial Dependency Ratio stood at 85%, indicating very high fiscal dependency. The average Fiscal Decentralization Degree Ratio was 24%; Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio was 102%; PAD Efficiency Ratio was 10%; Local Tax Effectiveness Ratio was 105%; Local Tax Efficiency Ratio was 4%; Regional-Owned Enterprise contribution was 4%; Operational Expenditure Ratio was 50%; and PAD Growth Ratio was 18%.

Keywords : financial ratio analysis, financial performance, the langkat regency government

© 2026 The Author(s). Published by EMAS. Licensed under CC BY-SA 4.0.

1. PENDAHULUAN

Mengapa organisasi nirlaba perlu memiliki praktik manajemen keuangan yang baik, seperti halnya bisnis yang berorientasi laba? Lembaga pemerintah biasanya dibentuk untuk melayani masyarakat dan beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya,

mereka memprioritaskan penyediaan layanan dan terus meningkatkan kualitasnya, baik sekarang maupun di masa depan (Prasetia, 2019). Kapasitas pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembangunan dan pelayanan publiknya melalui sumber dayanya sendiri, daripada hanya bergantung pada pendanaan federal, tercermin dalam kinerja keuangannya. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah merupakan metrik penting untuk kinerja ini (Putri & Kunci, 2023).

Anggaran tersebut mencakup Pendapatan Daerah Asli, dana penyeimbang, dan sumber pendapatan legal lainnya, yang semuanya sangat penting untuk manajemen keuangan daerah. Mengapa begitu banyak kotamadya masih belum mampu mencapai tujuan otonomi fiskal mereka jika aturan yang mengatur pembiayaan daerah sudah begitu jelas? Dalam hal ini, Undang-Undang No. (Afifulloh et al., 2023) menyatakan bahwa pajak daerah, pungutan, pendapatan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah, serta sumber pendapatan legal lainnya membentuk Pendapatan Daerah Asli (PAD), yang merupakan komponen hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Namun pada kenyataannya, beberapa pemerintahan daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan fiskal. Kegagalan memenuhi target Pendapatan Daerah Asli, penggunaan dana yang tidak efektif, dan pelaporan keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel hanyalah beberapa dari masalah yang sedang berlangsung. Misalnya, program pelayanan publik di Kabupaten Langkat terancam oleh kinerja keuangan daerah yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Mencapai kemerdekaan melalui otonomi daerah adalah ide yang umum, tetapi apakah kekuasaan yang luas yang telah diberikan kepada daerah benar-benar digunakan secara maksimal? Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, istilah "otonomi daerah" mengacu pada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menangani dan mengendalikan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelidiki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu manfaat dari penerapan otonomi daerah (Ristanti & Handoyo, 2015). Keberhasilan implementasi otonomi daerah bergantung pada inisiatif pemerintah yang efisien dan efektif di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengembangan infrastruktur, serta menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui pemanfaatan secara menyeluruh potensi masing-masing daerah (Silitonga et al., n.d.).

Apakah pertumbuhan tahunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) benar-benar mencerminkan persepsi masyarakat tentang keberhasilan pembangunan, atau hanya sekadar angka? Data IPM untuk Kabupaten Langkat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2015–2024, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. IPM tercatat sebesar 67,80 pada tahun 2015, 68,30 pada tahun 2016, 69,00 pada tahun 2017, dan 70,40 pada tahun 2018, menunjukkan pertumbuhan yang progresif. Tren positif terus berlangsung dengan pencapaian 70,70 pada tahun 2019, tetap 70,70 pada tahun 2020, kemudian 71,60 pada tahun 2021, dan 72,60 pada tahun 2022. Di tahun 2023, IPM Kabupaten Langkat mencapai 74,30, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 74,80.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, mengapa Kabupaten Langkat masih berada di belakang rata-rata nasional walaupun indeks pembangunan manusia (IPM)-nya menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan selama sepuluh tahun terakhir? Lonjakan IPM Kabupaten Langkat dari angka 67,80 di tahun 2015 menjadi 74,80 di tahun 2024 menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terus berlangsung sepanjang dekade ini. Harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun sekolah, dan tingkat pendidikan yang diprediksi adalah tiga ukuran penting pembangunan manusia yang telah berkontribusi pada pencapaian ini. Kesejahteraan ekonomi adalah metrik penting lainnya, dan didasarkan pada rata-rata pengeluaran riil per orang. Meskipun HDI di Kabupaten Langkat lebih rendah dari rata-rata nasional, namun terus meningkat, yang berarti pembangunan manusia sedang mengalami kemajuan.

Kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki Kabupaten Langkat dan hasil kinerja keuangan yang masih tidak stabil inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait kinerja keuangan daerah. Para penulis studi ini berharap Pemerintah Kabupaten Langkat dapat menggunakan temuan tersebut sebagai dasar untuk evaluasi yang akan membantu mereka memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan peran perusahaan milik daerah dalam mendatangkan lebih banyak uang bagi daerah. Dari sudut pandang akademis, studi ini menambah literatur yang berkembang tentang topik pengukuran kinerja keuangan melalui analisis berbasis rasio dan dapat digunakan sebagai preseden untuk studi masa depan dengan fokus serupa, dalam hal ini pada manajemen keuangan administrasi daerah Kabupaten Langkat.

Kabupaten Langkat telah menunjukkan hasil yang menjanjikan pada beberapa indeks pembangunan, menurut statistik dan penjelasan yang diberikan mengenai permasalahan tersebut. Misalnya, antara tahun 2015 dan 2024, Indeks Pembangunan Manusia meningkat secara stabil dari 67,80 menjadi 74,80, dan antara tahun 2020 dan 2024, tingkat pengangguran turun dari 6,90% menjadi 4,50%. Fluktuasi yang terus-menerus dalam kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya masalah yang terus-menerus dalam mengendalikan rasio pendapatan terhadap laba (ROR), meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan menetapkan tingkat otonomi fiskal yang konsisten untuk daerah. Kesenjangan antara peningkatan sumber daya manusia yang stabil dan kinerja keuangan daerah yang tidak dapat diprediksi menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian, efektivitas, dan efisiensi manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dan untuk menentukan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Langkat mampu memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer federal, menilai efisiensi pengelolaan anggaran belanja daerah dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan publik, serta meneliti perkembangan dan tren kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat selama periode analisis melalui rasio-rasio keuangan daerah.

2. LITERATUR

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Pendapatan Daerah Asli (PAD) untuk memenuhi pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran operasional dan modal, merupakan faktor kunci dalam tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Salah satu ukuran otonomi ekonomi suatu daerah adalah jumlah kontribusi Pendapatan Daerah Asli (PAD) terhadap pendanaan ini. Di sisi lain, ketika sebagian besar pengeluaran masih ditanggung oleh sumber luar, kemandirian daerah biasanya rendah (Handoko et al., 2019).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan finansial daerah merupakan indikator yang dihasilkan melalui perbandingan antara total pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dan total pendapatan daerah tersebut (Handoko et al., 2019). Kemampuan Pendapatan Daerah Asli (PAD) untuk memenuhi pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran operasional dan modal, merupakan faktor kunci dalam tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. (Arafah & Najamuddin, 2023) .

Rasio Desentralisasi Fiskal

Seberapa besar kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah federal kepada pemerintah negara bagian dan lokal dalam hal keuangan tercermin dalam tingkat desentralisasi fiskal. Kemampuan suatu daerah untuk menangani tata kelola secara otonom dan desentralisasi berbanding lurus dengan penerimaan pendapatannya (Pertiwi et al., 2026a) .

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan daerah asli yang telah ditentukan dalam kaitannya dengan kemampuan riil daerah dapat dilihat pada rasio efektivitas pendapatan daerah asli (Handoko et al., 2019).

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisien untuk pengumpulan Pendapatan Asli Daerah dapat ditunjukkan dalam rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah, yang menunjukkan berapa banyak uang yang sebenarnya dikumpulkan dibandingkan dengan berapa banyak yang dihabiskan. Metrik ini digunakan untuk menilai efektivitas proses pengumpulan dan pengelolaan pendapatan pemerintah daerah. (Ilmi, 2023)

Rasio Efektivitas Asli Daerah

Salah satu ukuran efisiensi pemerintah dalam mengumpulkan pajak dalam kaitannya dengan tujuannya adalah rasio efektivitas pajak daerah (Nindita & Rahayu, 2018). Tujuan metrik ini adalah untuk menunjukkan seberapa baik tujuan pendapatan pajak daerah tercapai dalam tahun fiskal tertentu (Maharani & Sari, 2021).

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Handoko dkk. (2019) mendefinisikan rasio efisiensi pajak daerah sebagai indikator yang membandingkan biaya pengumpulan pajak dengan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh daerah tersebut. Menurut Perdana dkk. (2024), pemerintah daerah dianggap efisien dalam pengumpulan pajak jika rasionya kurang dari 1 atau kurang dari 100%.

Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

Salah satu cara untuk mengukur kontribusi perusahaan milik daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan rasio kontribusi perusahaan milik daerah. Perusahaan Milik Daerah (RoE) berkontribusi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi melalui dividen dan pembagian keuntungan dengan pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh rasio ini (Heriasman & Suwaji, 2021).

Rasio Belanja Operasi

Total pengeluaran operasional dibagi dengan total pengeluaran dikenal sebagai rasio pengeluaran operasional. Rasio ini menunjukkan persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengeluaran operasional, yang merupakan informasi berguna bagi pembaca laporan ini. Pengeluaran operasional adalah pengeluaran yang digunakan dalam satu tahun fiskal, yang berarti pengeluaran tersebut normal dan berulang serta memiliki dampak jangka pendek. Pengeluaran operasional biasanya mencakup porsi yang tidak proporsional dari total pengeluaran daerah, berkisar antara 60% hingga 90%. Hal ini terutama berlaku untuk pemerintah daerah yang memiliki aliran pendapatan yang substansial. Pemerintah daerah dengan pendapatan terbatas memiliki pengeluaran operasional yang lebih rendah. (Wijaya & Windhani, 2025)

Rasio Pertumbuhan PAD

Untuk menilai kesehatan fiskal suatu kotamadya, seseorang dapat melihat rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melihat apakah pertumbuhannya pesat atau hampir tidak ada sama sekali. Hal ini dilakukan dalam satu atau beberapa periode yang saling terkait (Piter & Kekry, 2021). Mengenai hal ini, pertumbuhan pendapatan daerah tentu diharapkan memiliki angka yang tinggi dan terus meningkat, sehingga pemerintah daerah bisa mempertahankan bahkan meningkatkan realisasi pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Sertika et al, 2022).

Kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya diukur dengan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari beragam sumber pendapatan yang dimiliki daerah tersebut. Gunakan rasio ini untuk melihat berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah) suatu wilayah dalam tahun fiskal tertentu.

Menurut (Amu et al., 2023) rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah Asli (PAD) mengevaluasi tingkat pencapaian yang diraih oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan mereka, yang

mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan pertumbuhan PAD jika dibandingkan dengan era masa lalu dan masa depan, rasio ini melacak perubahan dalam pertumbuhan PAD (Susanto, 2019).

Kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Asli (PAD) berkurang jika rasio pertumbuhan menunjukkan jumlah yang sangat rendah. Jadi, penting untuk mengetahui apa yang mendorong penurunan ini. Penurunan ini dapat terjadi karena sejumlah alasan, beberapa di antaranya di luar kendali pemerintah dan yang lainnya merupakan akibat dari manajemen keuangan daerah yang buruk. Kita dapat menerapkan metode berikut untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan pendapatan daerah asli (PAD) selama periode waktu tertentu (Susanto, 2019)

3. METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan statistik keuangan yang tersedia untuk umum, studi ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif untuk mengkarakterisasi dan menganalisis situasi keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari data keuangan numerik untuk menilai kemampuan keuangan daerah. Pemeriksaan dokumen resmi merupakan metode pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk situs web pemerintah yang berwenang dan lembaga terkait, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BUMN) yang mencakup tahun 2015–2024, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Sumber sekunder, seperti laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran, juga dikonsultasikan. Sebanyak sepuluh rasio keuangan daerah digunakan untuk analisis. Rasio-rasio ini meliputi: kemandirian keuangan daerah, ketergantungan, desentralisasi fiskal, pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi pajak, kontribusi usaha milik daerah, keselarasan pengeluaran operasional, dan pertumbuhan pendapatan daerah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari situs web resmi Kabupaten Langkat (<https://portal.kabupatenlangkat.go.id>), selama lima tahun terakhir (2020–2024), Kabupaten Langkat telah menerima Opini Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP) dari auditor sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2021–2024, sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Langkat menerima Opini Bersyarat (Wajar Dengan Pengecualian atau WDP).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat otonomi fiskal yang sangat tinggi ditunjukkan setiap tahunnya oleh Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Delapan persen adalah rasio keuangan daerah yang umum. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah termasuk dalam kategori "Sangat Rendah", sehingga situasi ini menunjukkan belum berhasil meningkatkan kemandirian fiskal secara signifikan.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2015 – 2024

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Perbandingan	Rasio Keuangan	Pola
2015	122,715,359,910	1,804,265,890,307	7%	Sangat Rendah	Informatif
2016	132,673,213,413	1,885,124,794,027	7%	Sangat Rendah	Informatif
2017	139,717,647,855	1,871,062,152,590	7%	Sangat Rendah	Informatif
2018	136,680,578,541	1,806,703,118,972	8%	Sangat Rendah	Informatif
2019	167,523,076,880	1,868,438,425,165	9%	Sangat Rendah	Informatif
2020	168,843,723,200	1,623,324,864,132	10%	Sangat Rendah	Informatif
2021	167.397.847.516	1,994,039,603,483	7%	Sangat Rendah	Informatif
2022	140,628,891,267	2,035,341,678,524	7%	Sangat Rendah	Informatif
2023	255,321,768,506	2,128,645,1194,851	12%	Sangat Rendah	Informatif
2024	187,419,564,783	2,221,909,681,895	8%	Sangat Rendah	Informatif

Rata-rata	163,861,866,636	1,904,484,877,342	8%	Sangat Rendah	Informatif
-----------	-----------------	-------------------	----	---------------	------------

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK Sumut, 2015-2024

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan, kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat masih belum memadai. Rasio ketergantungan rata-rata tetap berada di angka 85% meskipun trennya menurun dengan hanya dua kali kenaikan kecil dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih berada dalam kategori “Cukup”, sehingga kondisi ini mencerminkan kinerja yang ideal.

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat 2015 – 2024

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Perbandingan	Kapasitas Moneter
2015	1,804,265,890,307	2,020,688,705,027	91%	Cukup
2016	1,885,124,794,027	2,215,047,135,450	85%	Cukup
2017	1,871,062,152,590	2,311,283,153,445	81%	Cukup
2018	1,806,703,118,972	2,226,626,152,513	81%	Cukup
2019	1,868,438,425,165	2,361,512,739,445	79%	Cukup
2020	1,623,324,864,132	2,122,684,872,332	76%	Cukup
2021	1,994,039,603,483	2,266,625,881,854	88%	Cukup
2022	2,035,341,678,524	2,213,563,402,095	92%	Cukup
2023	2,128,645,194,851	2,425,687,575,352	88%	Cukup
2024	2,221,090,681,895	2,452,426,425,326	91%	Cukup
Rata-rata	1,904,484,877,324	2,266,994,594,860	85%	Cukup

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK Sumut, 2015-2024

Rasio Besaran Desentralisasi Fiskal

Menurut hasil perhitungan, Kabupaten Langkat memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang termasuk dalam kategori "Sangat Rendah", dengan rata-rata sebesar 7%. Pencapaian ini menunjukkan keyakinan pemerintah pusat terhadap kemampuan pemerintah kabupaten Langkat dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan

Tabel 3. Desentralisasi Fiskal Kabupaten Langkat 2015 – 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Perbandingan	Kapasitas Moneter
2015	122,715,539,910	2,020,688,705,027	6%	Sangat Rendah
2016	132,673,213,413	2,215,047,135,450	6%	Sangat Rendah
2017	139,717,647,855	2,311,283,153,445	6%	Sangat Rendah
2018	136,680,578,541	2,226,626,152,513	6%	Sangat Rendah
2019	167,523,076,880	2,361,512,739,445	7%	Sangat Rendah
2020	168,843,723,200	2,122,684,872,332	8%	Sangat Rendah
2021	167,397,847,516	2,266,625,881,854	7%	Sangat Rendah
2022	140,628,891,516	2,213,563,402,095	6%	Sangat Rendah
2023	255,321,768,506	2,425,687,575,352	11%	Rendah
2024	187,419,564,783	2,452,426,425,326	8%	Sangat Rendah
Rata-rata	367,214,948,508	2,266,994,594,860	7%	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Para peneliti menemukan bahwa rasio rata-rata Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah 102%, menempatkannya pada kategori "Sangat Efektif" dalam kapasitas keuangan. Akibatnya, pendapatan daerah dapat dimaksimalkan atau direalisasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sepenuhnya, berbeda dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah tersebut.

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 2015 – 2024

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Perbandingan	Kapasitas Moneter
2015	122,715,539,910	111,750,322,000	110%	Sangat Eektif
2016	132,673,213,413	121,669,944,360	109%	Sangat Eektif
2017	139,717,647,855	134,595,233,000	104%	Sangat Eektif
2018	136,680,578,541	148,932,567,030	92%	Cukup Efektif
2019	167,523,076,880	156,520,657,861	107%	Sangat Efektif
2020	168,843,723,200	167,120,835,030	101%	Sangat Efektif
2021	158,480,919,772	168,644,529,430	94%	Cukup Eektif
2022	140,628,891,267	127,617,159,600	110%	Sangat Eektif
2023	255,321,768,506	253,393,415,220	101%	Sangat Eektif
2024	187,419,564,783	200,160,600,000	94%	Cukup Efektif
Rata-rata	161,000,474,413	161,767,946,813	102%	Sangat Eektif

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan yang dilakukan peneliti terhadap rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan rata-rata sebesar 10%, dengan tingkat kapasitas moneter yang dikategorikan sebagai "Efisien". Hal ini menunjukkan bahwa administrasi distrik Langkat telah gagal memanfaatkan sumber daya terbatasnya secara maksimal untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat 2015 – 2024

Tahun	Belanja Operasi	Pemanfaatan Pendapatan Daerah	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	1,321,557,404,368	122,715,539,910	9%	Sangat Efisien
2016	1,379,788,395,400	132,673,213,413	10%	Efisien
2017	1,459,434,222,676	139,717,647,855	10%	Efisien
2018	1,525.143,275.228	136,680,578,541	9%	Sangat Efisien
2019	1,535,165,052,450	167,523,076,880	10%	Efisien
2020	1,516,034,508,431	168,843,723,200	11%	Efisien
2021	1,539,110,261,048	158,480,919,772	10%	Efisien
2022	1.579,488,241,699	140,628,891,267	9%	Sangat Efisien
2023	1,659,647,305,369	255,321,768,506	15%	Efisien
2024	1,817,604,308,101	187,419,564,783	10%	Efisien
Rata-rata	1,526,796,808,992	161,000,474,413	10%	Efisien

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Peneliti menghitung rasio efektivitas pajak daerah rata-rata di Kabupaten Langkat sebesar 105%, yang termasuk dalam tingkat kapasitas moneter "Sangat Efektif ". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mencapai target pendapatan pajak daerah masih belum memadai.

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Langkat 2015 – 2024

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Penganggaraan Pajak Daerah	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	46,948,822,153	42,120,000,000	111%	Sangat Efektif
2016	42,304,284,903	45,973,000,000	92%	Sangat Efektif
2017	56,895,356,836	50,658,000,000	112%	Sangat Efektif

2018	59,765,187,014	58,260,000,000	103%	Sangat Efektif
2019	76,128,182,957	67,642,000,000	113%	Sangat Efektif
2020	71,908,157,019	70,986,254,380	101%	Sangat Efektif
2021	73,316,017,857	72,001,254,380	102%	Sangat Efektif
2022	89,933,504,202	74,821,254,380	120%	Sangat Efektif
2023	208,518,972,708	204,000,000,000	102%	Sangat Efektif
2024	146,402,351,359	150,740,000,000	97%	Sangat Efektif
Rata-rata	88,608,914,369	86,297,406,798	105%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Peneliti menghitung rata-rata rasio efisiensi pajak daerah di Kabupaten Langkat sebesar 4%, yang menunjukkan bahwa kapasitas moneter di Kabupaten Langkat “Sangat Efisien”.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Pajak Kabupaten Langkat 2015-2024

Tahun	Biaya Pengumpulan Pajak Lokal	Penerimaan Pajak Daerah	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	3,000,000,000	46,948,822,153	6%	Sangat Efisien
2016	0	42,304,284,903	0%	Sangat Efisien
2017	2,045,837,259	56,895,356,836	4%	Sangat Efisien
2018	2,393,626,980	59,765,187,014	4%	Sangat Efisien
2019	2,983,755,980	76,128,182,957	4%	Sangat Efisien
2020	2,837,111,400	71,908,157,019	4%	Sangat Efisien
2021	3,424,300,380	73,316,017,857	5%	Sangat Efisien
2022	3,701,212,560	89,933,504,202	4%	Sangat Efisien
2023	9,423,900,000	208,518,972,708	5%	Sangat Efisien
2024	6,647,950,000	146,402,351,359	5%	Sangat Efisien
Rata-rata	4,050,854,951	88,608,914,369	4%	Sangat Efisien

Sumber: Laporan Keuangan Pasca Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah

Angka-angka menunjukkan bahwa rata-rata, usaha milik lokal di Kabupaten Langkat menyumbang 4% dari total pendapatan daerah. Meskipun hal ini dapat secara signifikan memengaruhi perkembangan usaha milik lokal, data ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap pendapatan daerah berada dalam kategori "Kontribusi Rendah Sekali". Berdasarkan hasil ini, usaha milik lokal masih memiliki kontribusi yang rendah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Langkat 2015-2024

Tahun	Laba Badan Usaha Milik Daerah	Pemanfaatan Pendapatan Daerah	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	5,745,433,350	122,715,539,910	5%	Kontribusi Rendah Sekali
2016	7,996,061,801	132,673,213,413	6%	Kontribusi Rendah Sekali
2017	1,687,169,754	139,717,647,855	1%	Kontribusi Rendah Sekali
2018	7,421,389,631	136,680,578,541	5%	Kontribusi Rendah Sekali
2019	6,307,629,896	167,523,076,880	4%	Kontribusi Rendah Sekali
2020	8,730,147,444	168,843,723,200	5%	Kontribusi Rendah Sekali
2021	6,017,927,136	158,480,919,772	4%	Kontribusi Rendah Sekali
2022	9,140,559,933	140,628,891,267	6%	Kontribusi Rendah Sekali
2023	8,226,766,896	255,321,768,506	3%	Kontribusi Rendah Sekali
2024	9,252,868,370	187,419,564,783	5%	Kontribusi Rendah Sekali
Rata-rata	6,920,933,393	161,000,474,413	4%	Kontribusi Rendah Sekali

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015- 2024

Rasio Belanja Operasi

Rasio Pengeluaran Operasional Daerah untuk Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih belum memadai. Meskipun telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dengan hanya dua kali sedikit peningkatan, rata-rata rasio ketergantungan berada pada angka 56 %. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih berada dalam kategori “Rendah”, sehingga kondisi ini mencerminkan kinerja yang ideal.

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Langkat 2015-2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	1,321,557,404,368	18,199,224,899,770	7%	Rendah
2016	1,379,788,395,400	22,871,998,573,415	6%	Rendah
2017	1,459,434,222,676	2,320,218,254,255	63%	Sedang
2018	1,525.143,275.228	2,224,110,114,424	69%	Sedang
2019	1,535,165,052,450	2,224,061,799,668	69%	Sedang
2020	1,516,034,508,431	2,183,224,861,800	69%	Sedang
2021	1,539,110,261,048	2,166,967,560,817	71%	Sedang
2022	1.579,488,241,699	2,265,521,092,187	70%	Sedang
2023	1,659,647,305,369	2,416,731,548,099	69%	Sedang
2024	1,817,604,308,101	2,645,375,805,401	69%	Sedang
Rata-rata	1,526,796,808,992	5,951,743,450,983	56%	Rendah

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Rasio Pertumbuhan PAD

Rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat sebesar 18% menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah meningkatkan pendapatannya dalam kategori “Rendah”, menurut hasil perhitungan. Pencapaian ini menunjukkan keyakinan pemerintah pusat terhadap kemampuan pemerintah kabupaten Langkat dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan.

Tabel 10. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat 2015-2024

Tahun	PAD Tn	PAD Tn-1	PAD Tn-PAD Tn-1	Perbandingan	Rasio Keuangan
2015	122,715,359,910	107,811,975,547	14,903,384,363	14%	Rendah
2016	132,673,213,413	122,715,359,910	9,957,853,503	8%	Sangat Rendah
2017	139,717,647,855	132,673,213,413	7,044,434,442	5%	Sangat Rendah
2018	136,680,578,541	139,717,647,855	-3,037,069,314	-2%	Sangat Rendah
2019	167,523,076,880	136,680,578,541	30,842,498,338	23%	Sedang
2020	168,843,723,200	167,523,076,880	1,320,646,320	1%	Sangat Rendah
2021	167.397.847.516	168,843,723,200	-52,244,624,603	-1%	Sangat Rendah
2022	140,628,891,567	167.397.847.516	24,029,792,970	21%	Sedang
2023	255,321,768,506	140,628,891,567	114,692,876,939	82%	Tinggi
2024	187,419,564,783	255,321,768,506	-67,902,203,724	-27%	Sangat Rendah
Rata-rata	156,812,292,325	148,851,533,402	7,960,758,924	18%	Rendah

Sumber: Laporan Keuangan Setelah Audit BPK SUMUT, 2015-2024

Pembahasan

Gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dari tahun 2015 hingga 2024 diperoleh dari data yang diolah menggunakan 10 analisis rasio keuangan. Setiap rasio mengungkapkan sesuatu tentang evolusi manajemen keuangan daerah, menurut temuan investigasi. Secara konsisten berada di sekitar 8%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diklasifikasikan sebagai

"sangat rendah" karena kurangnya fluktuasi tahunan yang signifikan. Menurut struktur hubungan yang telah ditetapkan, ketergantungan pada pemerintah pusat masih agak tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat karena belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan keuangan administrasi pemerintahan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji laporan keuangan Kabupaten Bone Bolango (2019–2021), Kabupaten Penajam Paser Utara (2020–2044), dan Kabupaten Kaimana (2016–2020) (Hapsari et al., 2025) (Nusi et al., 2023) dan (Syam & Zulfikar, 2022). Mirip dengan Kabupaten Langkat, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih buruk, sehingga menyebabkan ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat. Namun, kesimpulan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang mengkaji laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 hingga 2023 dan Kota Yogyakarta tahun 2018 hingga 2023 (Khikmah & Aulia, 2025) (Nisa & Wafa, 2025). Menurut penelitian, kedua wilayah tersebut sangat mandiri secara finansial karena menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai desentralisasi, pelayanan publik, dan otonomi daerah, daripada sangat bergantung pada dana transfer federal.

Pemerintah Kabupaten Langkat masih memiliki tingkat otonomi anggaran yang rendah, seperti yang ditunjukkan oleh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Dengan rata-rata 85% dari tahun 2015 hingga 2024, rasio ketergantungan keuangan daerah dianggap "cukup". Fakta ini membuktikan bahwa dana transfer federal dan provinsi terus menjadi tulang punggung anggaran daerah. Oleh karena itu, untuk membiayai tata kelola dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada sumber keuangan dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang mengkaji laporan keuangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 hingga 2024, dan Kabupaten Kaimana tahun 2016 hingga 2020 (Nasution & , Hasnah Juniarni Nasution, 2019) (Nasution & , Hasnah Juniarni Nasution, 2019) dan (Syam & Zulfikar, 2022). Tingkat kemandirian fiskal optimal daerah tersebut, menurut ketiga penelitian tersebut, dicapai dengan mempertahankan tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat. Namun, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengkaji laporan keuangan Kabupaten Samosir tahun 2019 dan tahun 2018–2022, yang masing-masing diterbitkan oleh (Dian Anita & Octavianidori, 2024) dan (Nasution & , Hasnah Juniarni Nasution, 2019). Menurut studi tersebut, penurunan ketergantungan pada dana transfer meningkatkan kemampuan wilayah tersebut untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri, dibandingkan dengan Kabupaten Langkat.

Temuan dari studi Rasio Desentralisasi Fiskal menempatkan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam kategori "Sangat Rendah", dengan nilai rata-rata 7% dari tahun 2015 hingga 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum cukup untuk menutupi pengeluaran administrasi daerah. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, Kabupaten Langkat terus bergantung pada dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Penelitian di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2019 hingga 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2020 hingga 2024, dan Kabupaten Kaimana dari tahun 2016 hingga 2020 telah menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian ini (Meidina & Anggita, 2024), (Pertiwi et al., 2026b), (Yuvanda et al., 2025). Meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tetap menjadi tantangan bagi sebagian besar pemerintah daerah di luar kota-kota besar, menurut ketiga penelitian tersebut, yang menempatkan rasio desentralisasi fiskal dalam kategori "sedang". Namun, studi yang meneliti anggaran Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2022 hingga 2023 dan Kota Yogyakarta dari tahun 2018 hingga 2023 (Yuvanda et al., 2025), (Meidina & Anggita, 2024) menemukan bahwa hal tersebut tidak demikian. Penelitian menempatkan tingkat desentralisasi fiskal pada level "baik", artinya pemerintah daerah telah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat membiayai pendapatan secara keseluruhan serta pelaksanaan kewenangan daerah secara mandiri. Dari tahun 2015 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Langkat mencapai Rasio Efektivitas PPN rata-rata sebesar 102%, menempatkannya dalam kategori "sangat efektif".

Berdasarkan temuan ini, tampaknya PPN secara umum dapat memenuhi atau melampaui targetnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mewujudkan PPN terlihat jelas dalam situasi ini. Sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banggai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali, dan Kabupaten Kaimana pada tahun 2016–2020, temuan penelitian ini menguatkan temuan (Yuvanda et al., 2025), (Nisa & Wafa, 2025), dan (Parulian et al., 2024). Hasil dari ketiga penelitian tersebut menempatkan pengelolaan pendapatan daerah secara tegas dalam kategori "efektif", menunjukkan bahwa pemerintah dapat mencapai target pendapatan mereka. Di sisi lain, penelitian sebelumnya yang meneliti laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022–2023, serta Kota Yogyakarta untuk tahun 2018–2023, menemukan tingkat efektivitas Pendapatan Daerah yang berbeda dengan temuan penelitian ini di Kabupaten Langkat (Afifulloh et al., 2023), (Amu et al., 2023). Berdasarkan kriteria penelitian, Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat termasuk dalam kategori "Efisiens" dengan nilai rata-rata 10% dari tahun 2015 hingga 2024. Peneliti (A. R. Purba, 2022) (Melmambessy, 2022) meneliti laporan keuangan Kabupaten Banyumas (2016–2021), Kabupaten Banggai (Moridu, 2021) dan Kota Jayapura (2017–2019) dan menemukan hasil yang konsisten dengan penelitian ini. Menurut penelitian tersebut, pemerintah daerah masih berjuang untuk mengendalikan biaya pengumpulan pendapatan, artinya mereka tidak memanfaatkan pendapatan mereka secara maksimal. Namun, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian catatan keuangan Kabupaten Sikka 2016–2020 yang dilakukan oleh (Devinci et al., 2023). Berbagai daerah diklasifikasikan sebagai efisien atau tidak efisien berdasarkan temuan penelitian. Variasi ini menunjukkan bahwa keadaan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah memengaruhi efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Langkat adalah 105%, menempatkannya dalam kategori "Sangat Efektif". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah masih belum berfungsi secara konsisten, yang menyebabkan efektivitasnya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Marini & Yushita, 2023) (Nur et al., 2025) dan (Parulian et al., 2024) dimana mereka menganalisis laporan keuangan Provinsi Bali dari tahun 2016 hingga 2020, Kabupaten Banggai di mana pemenuhan target penerimaan pajak daerah masih sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi tahunan dan dinamika kepatuhan wajib pajak lokal. Tetapi, temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal ini tidak sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Arafah & Najamuddin, 2023) dan (Sari et al., 2020) dimana mereka menganalisis laporan keuangan Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024. Kedua wilayah cakupan studi tersebut secara umum masuk dalam kriteria optimal hingga sangat optimal, menunjukkan kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak yang jauh lebih optimal. Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Langkat termasuk dalam kategori "sangat efisien" dengan nilai rata-rata 4% dari tahun 2015 hingga 2024, menurut penelitian tersebut. Rasio tersebut menunjukkan nilai yang konsisten rendah selama periode pengamatan, bahkan mencapai 0% pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen pengumpulan pajak berfungsi secara efektif, karena biaya yang terkait dengan proses pengumpulan pajak daerah dapat diabaikan dibandingkan dengan pendapatan pajak yang diterima.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang meneliti laporan keuangan Kabupaten Sleman (2016–2020), Kabupaten Mandailing Natal (2013–2022), dan Kabupaten Samosir (2018–2022), oleh (Asri, 2022); (S. Purba, Sigiro, et al., 2024) dan (S. Purba, Jessika, et al., 2024). Rasio efisiensi biaya pengumpulan pajak daerah berada dalam kategori "sangat optimal", menurut ketiga penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan biaya operasional pengumpulan pajak tanpa memengaruhi pendapatan. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan temuan studi neraca keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2013 hingga 2022 (S. Purba, Wita, et al., 2024) Menurut penelitian ini, efisiensi pengumpulan pajak lebih rendah daripada di Kabupaten Langkat. Fakta bahwa daerah yang berbeda mendapatkan hasil yang berbeda menunjukkan bahwa kebijakan, metode manajemen, dan keadaan masing-masing pemerintah daerah menentukan sejauh mana pengelolaan pajak daerah efisien. Jadi, mungkin tidak semua daerah seefisien Kabupaten Langkat.

Selama periode 2015 hingga 2024, rata-rata Rasio Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Langkat adalah 4%, yang berarti diklasifikasikan sebagai "Kontribusi Rendah Sekali". Dampak BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minimal, meskipun persentase ini agak lebih tinggi daripada daerah lain. Untuk menjadi sumber pendapatan daerah yang lebih prospektif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Langkat masih memerlukan optimasi dalam manajemen, pengembangan bisnis, dan peningkatan kinerja. Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji laporan keuangan tahun 2014–2019 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Utara (Rumende et al., 2019), (Heriasman & Suwaji, 2021), dan (Yahya & Syafitri, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa BUMD belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah, artinya belum dapat menjadi penghasil kas utama bagi kota. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan (Lazuard, 2018), yang mengkaji laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2022. Rasio Kontribusi BUMD ditemukan tinggi dalam penelitian tersebut. Keragaman unit usaha BUMD yang produktif dan tata kelola perusahaan daerah yang efektif sama-sama berkontribusi pada kondisi ini, termasuk pada sektor nonperbankan, serta penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan secara tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap struktur fiskal daerah.

Rasio Belanja Operasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat dengan rata-rata 56% dengan kategori “Rendah” masih dialokasikan untuk belanja operasional guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara rutin. Namun demikian, keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal tetap perlu diperhatikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini konsisten dengan hasil studi yang meneliti laporan keuangan Kota Manado dari tahun 2011 hingga 2016, Kabupaten Magelang dari tahun 2017 hingga 2020, dan Kota Mataram dari tahun 2016 hingga 2020 (Meidina & Anggita, 2024) (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022) (Tumija & Ghina Sinta, n.d.). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang meneliti catatan keuangan Kabupaten Buton Utara dari tahun 2018 hingga 2022 dan Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2020 (Sharini & Kurniawan, 2024) (Tommy & Untu, 2018).

Terakhir, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya fluktuasi selama periode penelitian, dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 18% yang masuk kategori “Rendah”, bahkan mencatat angka negatif pada beberapa tahun. Hal ini sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Sartika et al., 2022) (Ramadhan & Sam, 2023) dan (Surya, 2026) dimana mereka menganalisis laporan keuangan Kabupaten Magelang dari tahun 2017 hingga 2020, Kota Mataram dari tahun 2016 hingga 2020, Kabupaten Tuban dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini bertentangan dengan temuan peneliti (Sharini & Kurniawan, 2024) serta (Piter & Kekry, 2021) ketika mereka meneliti anggaran Kota Yogyakarta (2020–2024) dan Kabupaten Merangin (2018–2021). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan APD positif dan sangat konsisten dari tahun ke tahun, yang mereka kaitkan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan. Variasi ini menunjukkan bahwa mempertahankan pertumbuhan APD yang stabil merupakan tantangan yang lebih besar bagi Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan APD di masa mendatang yang lebih tinggi dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus terus mencari cara baru untuk menghasilkan uang, meningkatkan pelayanan pajak, dan meningkatkan pengelolaan aset daerah.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sepuluh rasio keuangan Kabupaten Langkat dari tahun 2015–2024 menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Rasio Otonomi Keuangan rata-rata hanya 8% (sangat rendah, pola yang patut diperhatikan), Rasio Ketergantungan Keuangan mencapai 85% (Cukup), Rasio Desentralisasi Fiskal 7% (Rendah), Rasio Efektivitas Pendapatan 102% (sangat efektif), Rasio Efisiensi Pendapatan 10% (efisien), Rasio Efektivitas Pajak Daerah 105% (sangat efektif), Rasio Efisiensi Pajak Daerah 4% (sangat efisien), Rasio Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah 4% (Kontribusi Rendah Sekali), Rasio Pengeluaran Operasional 56% (sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan operasional), dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rata-rata hanya 18% (rendah dan berfluktuasi, bahkan negatif di beberapa tahun). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Langkat memiliki kinerja yang baik dalam efisiensi pajak dan efektivitas penerimaan, kinerja keuangan total wilayah tersebut masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dipengaruhi oleh manajemen penerimaan yang tidak efisien, kontribusi BUMD yang rendah, dan pertumbuhan penerimaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, kebijakan di masa mendatang harus fokus pada peningkatan efisiensi manajemen penerimaan, optimalisasi kontribusi BUMD, dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Untuk studi selanjutnya, akan lebih bijaksana untuk menyertakan lebih banyak variabel yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama atau membandingkan beberapa distrik/kota, dan menggunakan berbagai metode analisis. Hal ini akan memungkinkan hasil yang lebih menyeluruh dan rekomendasi yang lebih rinci untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh, Hadiyantina, S., & Sn, T. A. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 2(2), 97–111.
- Amu, A., Niswanti, & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291–307.
- Arafah, R., & Najamuddin, H. (2023). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Transfer Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan. *Journal Ak-99*, 3(November), 323–332.
- Asri, D. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal*, 11(1), 130–138.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen Unipa*, 9(2).
- Dian Anita, & Octavianidori, I. (2024). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(71).
- Handoko, Pratama, A., & Sarah, M. (2019). Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 1–14.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., Unia, R., & Umroh, Z. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran License. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V4i1.87>
- Heriasman, & Suwaji. (2021). Efektifitas Dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Indragiri Hulu. *Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 4328(April), 60–68.
- Ilmi, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah , Size Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (Jakpt)*, 1(2), 216–223.
- Khikmah, N., & Aulia, N. (2025). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022-2023). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 105–115.
- Lazuard, M. (2018). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jiep : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 1–20.
- Maharani, I., & Sari, R. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(November), 1392–1403.

- Marini, E. O., & Yushita. (2023). Analisis Rasio Kemandirian , Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (Jikabi)*, 2(2), 97–105. <https://doi.org/10.31289/Jbi.V2i2.2964>
- Meidina, C., & Anggita, W. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2022. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 12(2), 149–163.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13, 10–15.
- Moridu, I. (2021). Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08, 90–97.
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/Jisamar.V6i3.819>
- Nasution, F. M., & Hasnah Juniarni Nasution, R. T. (2019). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. 25–32.
- Nisa, N. R. C., & Wafa, Z. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023. *Ecoducation Economics & Education Journal*, 7(April), 257–270.
- Nur, S., Nasution, F., Syahrani, A., & Astari, P. (2025). Analysis Of Independence Ratio , Effectiveness Ratio And Growth Ratio In Assessing The Financial Performance Of Bandung City Government. *Educom: Journal Research*, 4(6), 226–234.
- Nusi, T. F. A., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Di Kabupaten Bone Bolango Tri. *Ijen: Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 01(01), 37–45.
- Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Ditinjau Dari Kontribusi Pad , Elastisitas Pad Dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. *Journal Of Accounting And Finance Management*, 5(4), 744–760.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026a). Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Di Indonesia : Systematic Literature Review. 4(4), 10365–10371.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026b). Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Di Indonesia : Systematic Literature Review. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 4(4), 10365–10371.
- Piter, B., & Kekry, N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 1(10), 203–210.
- Prasetia, E. H. (2019). Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. *Jurist-Diction*, 2(6), 2079–2112.
- Purba, A. R. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuwangi. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6, 1004–1012.
- Purba, S., Jessika, L., Debora, G., Pakpahan, R. A., & Syaputri, J. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 9, 107–118.
- Purba, S., Sigiyo, T., Nadeak, O., Tampubolon, S., & David Siahaan. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(1).
- Purba, S., Wita, T., Br, A., Tarigan, A. Y., Yan, J., Siregar, R., & Siregar, N. E. (2024). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan. *Financial: Jurnal Akuntansi Published*, 10(April), 49–62.
- Putri, S. P., & Kunci, K. (2023). Pengaruh Pad , Dana Perimbangan , Dan Silpa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Jesya*, 6(2), 2068–2082.
- Ramadhan, A., & Sam, I. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021. *Journal Of Student Research (Jsr)*, 1(4), 104–118.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 32.

- Rumende, H. J., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Pt. Bank Solutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 31–50.
- Sari, R. W., Syahrir, G., & Usman. (2020). Efektivitas Program Keluarga Berencana Implant Dalam Menekan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 1(1).
- Sartika, D., Mulyani, F., & Ilyas, A. (2022). Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Operasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 51–68.
- Sharini, P. A., & Kurniawan, R. (2024). Economics And Digital Business Review Analisis Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. *Economics And Digital Business Review*, 5(2), 875–883.
- Silitonga, I., Siahaan, S., & Purba, S. (N.D.). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi*.
- Surya, M. (2026). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 14(1), 39–43.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
- Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016 Analysis Of Regional Financial Performance In The Government Of Manado City From 2011-2016. *Jurnal Emba*, 6(3), 1398–1408.
- Tumija, & Ghina Sinta. (N.D.). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 61–78.
- Wijaya, T., & Windhani, K. (2025). Mandiri Atau Bergantung ? Analisis Desentralisasi Fiskal Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Kuningan. 5(3).
- Yahya, C. M., & Syafitri, W. (2024). Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 3(4), 994–1008.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Herlin, F. (2025). Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah : Studi Empiris Kabupaten / Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 14(02), 525–532.